

## Begini Modus Penipuan Bisnis Online Makan Korban Ratusan Mahasiswa IPB

**BOGOR (IM)**- Tersangka penipuan bisnis online bernisial SAN melakukan aksinya dengan modus pencairan dana dan bisnis melalui toko online. Tetapi, toko online tersebut rupanya bukan milik tersangka. "Setelah penyidik mencari informasi, ternyata toko itu milik orang lain. Pelaku juga mengimingi keuntungan 10-15 persen atas tiap transaksi yang dilakukan korban," kata Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin kepada wartawan, Jumat (18/11).

Sedangkan, untuk menggaet mahasiswa, SAN kebetulan kenal dengan para senior-senior. Dari situ, SAN memperkenalkan bisnis online kepada korban mahasiswa baik melalui seminar online dan lainnya. "Masuknya ke kampus kebetulan ada yang kenal dengan pelaku dari kakak kelas korban sehingga pelaku mengadakan kegiatan seminar melalui Zoom meeting, menawarkan kerja sama yang sebagaimana disampaikan pelaku ke korban," jelasnya.

Sejauh ini, tercatat ada 317 orang yang menjadi korban di mana mayoritas adalah mahasiswa IPB. Total kerugian kurang lebih Rp2,3 miliar. "Kalau total korban dari perbuatan itu sebagaimana yang dilaporkan ke kami ada 317 orang. Itu dari beberapa mahasiswa di universitas berbeda. Kami juga koordinasi dengan Polresta Bogor Kota ada juga

korban merupakan masyarakat biasa. Rp2,3 miliar itu dari keseluruhan berdasarkan perhitungan pihak pinjol dan dari pengakuan pelaku sendiri," jelasnya.

Adapun hasil dari penipuan tersebut digunakan oleh tersangka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, juga untuk menutupi tagihan dari korban lainnya. "Hasil kejahatannya digunakan untuk kebutuhan pribadi. Sebagian lagi digunakan untuk membeli kendaraan bermotor dan sebagian lagi untuk menutupi utang dari korban sebelumnya, jadi gali lubang tutup lubang," ungkap Iman.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP ancaman hukuman 4 tahun penjara. Polisi masih terus mendalami ada tidaknya pelaku lain yang berperan aktif dalam kasus tersebut. "Semua saksi dan korban yang terkait dengan perbuatan tersangka ini kami akan lakukan pemeriksaan dan penyidikan terus berkembang mengikuti fakta hukum yang terus berkembang," tutupnya.

SAN, pelaku penipuan terhadap ratusan mahasiswa IPB University ini kini dijadikan tersangka oleh Sat Reskrim Polres Bogor setelah dijemput di rumahnya di Kota Bogor. SAN diadopsi melakukan tindak pidana penipuan terhadap mahasiswa IPB University dengan ancaman hukuman pidana selama 4 tahun.

● **gio**

## 8.034 Orang di Riau Terjangkit HIV, Temuan Terbanyak pada Usia Produktif

**RIAU (IM)**- Sebanyak 8.034 orang di Riau terjangkit HIV/AIDS. Jumlah itu berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan Provinsi Riau hingga akhir Oktober 2022. Dari jumlah itu, sebanyak 3.711 orang dalam kondisi stadium AIDS.

"Penemuan kasus HIV di Provinsi Riau jumlahnya sebesar 8.034 orang," ujar Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution Jumat (18/11).

Menurutnya, karakteristik temuan kasus HIV dan AIDS di Provinsi Riau sudah mengarah kepada populasi umum. Di mana jumlah terbesar penderita penyakit mematikan itu berada di Kota Pekanbaru dengan temuan kasus sejumlah 4.730 orang.

"Untuk kasus HIV pada ibu rumah tangga termasuk terbesar ketiga. Tapi, jika dikelompokkan ke dalam kelompok usia, maka temuan kasus HIV terbesar banyak ditemukan pada kelompok umur 25 sampai dengan 45 tahun artinya ini usia produktif," jelasnya.

Menurut Edy, upaya percepatan penanggulangan HIV/AIDS secara nasional Pemerintah telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar itu harus dicapai oleh Pemerintah Daerah dan sudah tertuang dalam PP Nomor 2 tahun 2018.

Pencapaian SPM tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Bupati, Wali Kota dan Gubernur.

"Pemprov Riau sudah beru-

paya untuk melakukan penanggulangan HIV/AIDS," kata Edy.

Dengan menetapkan Perda Nomor 4 tahun 2006 tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Riau.

"Orang yang terdampak HIV/AIDS ini harus dilakukan pendekatan dan dirangkul untuk menanganinya agar pertolongan bisa berjalan lancar," katanya.

Edy mengimbau organisasi perangkat daerah terkait untuk melakukan penganggaran tentang HIV/AIDS sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebab, kata Edy, kebijakan alokasi anggaran ini sebagai salah satu bukti dan dapat memberikan gambaran upaya memerangi HIV/AIDS mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah.

"Mari kita masifkan promosi pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS. Manfaatkan media digital, teknologi digital terbaru, perluaskan akses pencegahan dan tes, hingga pengobatan," harapnya.

Edy juga meminta agar jangan ada pemberhentian pengobatan terhadap penderita HIV. Dia juga mengajak masyarakat ikut berperan membantu penanggulangan HIV tersebut.

"Satukan langkah cegah HIV, diharapkan semua pihak bersama masyarakat dapat berperan aktif dalam mengakhiri epidemi HIV," pungkasnya. ● **pra**



IDN/ANTARA

**PETERNAKAN AYAM KAMPUNG PETELUR DI BPTP GORONTALO**  
Seorang petugas pengawas mengumpulkan telur ayam kampung Unggul Balitbangtan (KUB) di kandang ayam modern BPTP, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Jumat (18/11). Peternakan ayam KUB BPTP Gorontalo menghasilkan rata-rata 550 butir telur per pekan yang ditetaskan menjadi Day One Chicken (DOC) untuk didistribusikan kepada masyarakat, peternak inti, dan peternak plasma di Provinsi Gorontalo serta untuk kepentingan diseminasi.

## Kawasan Kampung Adat Miduana Cianjur Mulai Ditata

**CIANJUR (IM)**- Kawasan Kampung Adat Miduana di Desa Balegede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mulai ditata. Tahap awal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cianjur tengah membangun fasilitas berupa basecamp bagi para wisatawan bernama Bumi Ageung.

Dewan Adat Miduana, Abah Rustiman, menjelaskan, keberadaan fasilitas basecamp diharapkan bisa memberikan kenyamanan bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Kampung Adat Miduana. Para wisatawan bisa beristirahat di tempat tersebut. "Alhamdulillah, kawasan Kampung Adat Miduana sekarang sudah mulai ada penataan. Terutama pembangunan fasilitas bagi wisatawan," kata Rustiman, kemarin.

Biaya pembangunan fasilitas wisata Kampung Adat Miduana dianggarkan sebesar Rp466 juta. Pelaksanaan pengerjaannya selama

90 hari kalender. "Tentu kami berharap dengan berbagai penataan fasilitas ini bisa meningkatkan kunjungan wisatawan yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat," jelasnya.

Rustiman pun berharap berbagai fasilitas lain yang diperlukan bisa segera dibangun pemerintah. "Terutama fasilitas infrastruktur, seperti jalan maupun lahan parkir. "Semoga saja ada kelanjutan pembangunannya untuk mendukung kenyamanan wisatawan," pungkasnya.

Abah Dayat, warga adat lainnya, menyambut baik penataan fasilitas kawasan wisata Kampung Adat Miduana. Ia pun berharap berbagai penataan bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. "Mudah-mudahan bisa membawa hal yang positif dengan upaya penataan ini," pungkasnya. ● **pra**

# 8 | Nusantara



IDN/ANTARA

### RUWATAN BERSIH NAGARI DI TULUNGAGUNG

Miss Universe Switzerland Alia Guindi (tengah) ikut menari sambil menabuh kendang saat pertunjukan tari reog kendang dalam tradisi ruwatan Bersih Nagari di depan pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (18/11). Ruwatan bersih nagari digelar dalam rangka memperingati HUT ke-817 Kabupaten Tulungagung.

## Jawa Barat Targetkan Seluruh Wilayahnya Bebas BABS Pada 2030

Selama ini kendala dalam upaya memudahkan warga mengakses jamban sehat antara lain keterbatasan lahan untuk membangun tangki septik pribadi maupun komunal. Guna mengatasi masalah itu, pemerintah mendorong pembangunan tangki septik di bawah bangunan rumah seperti yang sudah dilakukan di Cipedes, Pajajaran.

### BANDUNG (IM)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh kabupaten/kota di wilayahnya bebas dari perilaku buang air besar sembarang (BABS) pada 2030.

Ketua Tim Kerja Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Yunita Erdani di Kota Bandung, Jumat (18/11), men-

gatakan bahwa semula seluruh wilayah Jawa Barat diharapkan sudah bisa bebas dari perilaku BABS pada 2023.

"Pak Sekda mengharapkan bahwa pada tahun 2023 seluruh wilayah Jawa Barat bebas BABS. Namun, tampaknya hal tersebut masih jauh ya, karena sampai mau akhir 2022, baru enam kabupaten/kota yang masyarakatnya sudah terbebas

dari BABS," kata dia.

Dalam acara Jabar Punya Informasi (Japri) yang berlangsung di Gedung Sate Bandung, ia mengatakan bahwa saat ini baru Kabupaten Bandung Barat, Subang, Sukabumi, Bandung, dan Garut serta Kota Depok yang sudah bebas BABS.

"Jadi, akhirnya kami menargetkan atau mengharapakan sebelum 2030 nanti bisa tercapai target SDGs, diharapkan nanti semua kabupaten/kota seperti itu masyarakatnya, bebas BABS," katanya.

Dia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggiatkan penyuluhan dan pendampingan serta memudahkan warga mengakses jamban sehat dan menjalankan program sanitasi yang lain untuk menghentikan perilaku BABS.

Menurut dia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

berkoordinasi dan berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah terkait dalam upaya mewujudkan daerah yang bebas BABS.

Yunita mengemukakan bahwa selama ini kendala dalam upaya memudahkan warga mengakses jamban sehat antara lain keterbatasan lahan untuk membangun tangki septik pribadi maupun komunal.

Ia mencontohkan, di Kawasan Cihampelas, Kota Bandung, masih banyak toilet yang saluran pembuangannya langsung masuk ke Sungai Cikampung karena keterbatasan lahan untuk membangun tangki septik. Guna mengatasi masalah itu, ia mengatakan, pemerintah mendorong pembangunan tangki septik di bawah bangunan rumah seperti yang sudah dilakukan di Cipedes, Pajajaran.

"Upaya menggali septictank dicoba di lokasi di Cipedes. Mereka biasanya buang ke Sungai Citepus, tapi kini sudah membuat septictank di bawah kamar atau ruang tamu sekalipun, saluran udaranya dialirkan keluar," katanya.

Sementara itu, Ahli Madya Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Lucky Ruswandi mengatakan bahwa persentase warga Jawa Barat yang masih BABS sekarang sudah turun menjadi 15 persen dari 28 persen pada 2018.

Namun, ia mengatakan, angka tersebut masih tergolong besar mengingat penduduk Provinsi Jawa Barat hampir 40 juta jiwa. Menurut dia, dana yang dibutuhkan untuk menyediakan toilet aman bagi seluruh warga Jawa Barat total sekitar Rp20 triliun. "Atau Rp16 triliun untuk toilet yang layak," katanya. ● **pra**

### HADAPI GELOMBANG PHK

## Apindo KBB Usulkan Pemda Restrukturisasi Kredit Bagi Pengusaha

### NGAMPRAH (IM)

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menilai restrukturisasi kredit bagi pengusaha dapat mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para buruh.

Oleh karenanya, Apindo KBB mengusulkan pemerintah berperan aktif mewujudkan restrukturisasi kredit atau penjadwalan ulang agar dapat memberi nafas panjang terhadap pelaku industri di tengah lesunya penyerapan pasar.

Dengan begitu, langkah efisiensi tak akan menyentuh sektor pekerja.

"Kita usulkan ada pelonggaran berupa restrukturisasi pembayaran atau penjadwalan ulang. Supaya efisiensi perusahaan tidak berdampak ke pekerja. Jadi pemerintah harus berperan aktif di sini," kata Juru Bicara APINDO Bandung Barat, Yohan Ibrahim, Jumat (18/11).

Menurutnya, tren penyerapan pasar terhadap beberapa hasil produk industri seperti garmen dan tekstil memang cenderung menurun, baik di pasar ekspor maupun domestik.

Akibat, kecenderungan penurunan tersebut membuat perusahaan terpaksa memangkas neraca pengeluaran agar bisa tetap bertahan.

"Kalau suku bunga meningkat seperti saat ini dan kewajiban tetap dipenuhi, otomatis secara alamiah, di tengah penyerapan pasar kurang, mau gak mau akan merumahkan pekerja," tuturnya.

Kendati potensi pemutusan hubungan kerja terbuka, ia mengaku, Apindo belum menerima laporan adanya perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran.

Dirinya mending data yang dikeluarkan Disnakertrans Kabupaten Bandung Barat berasal dari perusahaan

di luar anggota Apindo.

"Saya belum menerima laporan resmi dari anggota terkait adanya PHK. Mungkin data itu dari pengusaha di luar APINDO," ungkapnya.

Seperti diketahui, Badai PHK diprediksi melanda sektor padat karya seperti garmen dan tekstil. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat 111 perusahaan telah mengurangi jumlah karyawan.

Bahkan, 16 perusahaan telah menutup operasi produksinya. Imbas pengurangan dan penyetopan operasi, sekitar 79.316 karyawan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Jawa Barat hingga awal November 2022.

Sedangkan di Bandung Barat, Disnakertrans mencatat jumlah buruh yang kena PHK sepanjang tahun 2022 mencapai 211 orang.

Data tersebut didapat berdasarkan laporan buruh yang menyerahkan surat pak-laring untuk persyaratan klaim jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

"Jadi jumlah yang kena PHK mencapai 211 orang. Angka ini berdasarkan data laporan ke Disnakertrans. Dari ratusan buruh yang kena PHK, sebanyak 53 orang melakukan klaim JKP," kata Kepala Disnakertrans KBB, Panji Hermawan, beberapa waktu lalu.

Ia menuturkan, ratusan buruh kena PHK ini terdiri dari berbagai sektor industri. Mulai dari industri makanan-minuman, garmen dan tekstil.

Menurutnya, alasan PHK mayoritas lantaran habis kontrak dan langkah perampingan pekerja. Selain itu, ada pula karena perusahaan tutup.



IDN/ANTARA

### PELESTARIAN BUDAYA JAWA DI PAPUA

Atraksi penari kuda lumping dalam kegiatan Parade Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Sorong, Papua Barat, Jumat (18/11). Ikatan Kerukunan Keluarga Sunda Jawa Madura (Ikaswara) menggelar parade UMKM dan budaya khas Jawa guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan mencegah terjadinya inflasi daerah serta sebagai upaya melestarikan budaya Jawa di tanah Papua.